

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN KOTA MANADO

Oleh:

Evran Lexy Tambuwun¹**Sifrid S. Pangemanan²****Dhullo Afandi³**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹evran_tambuwun@yahoo.com²sifridp_s@unsrat.ac.id³afandiafandibaksh@gmail.com**ABSTRAK**

Kinerja keuangan menunjukkan kondisi keuangan serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara dan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu perlu diukur kinerja pemerintah, sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Manado. Penelitian ini dilakukan di kantor Walikota Manado, data yang digunakan data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2011-2013. Metode yang digunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja keuangan dengan rasio keuangan. Hasil penelitian Rasio Derajat Desentralisasi kinerja keuangannya dinilai masih kurang, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kota Manado terhadap pendapatan dari Pusat dan Provinsi masih tinggi, tingkat kemandirian Pemerintah Kota Manado juga masih kurang diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, kemudian efektivitas realisasi penerimaan PAD Pemerintahan Kota Manado dikatakan cukup efektif, begitu pula halnya dengan efisiensi belanja Pemerintah Kota Manado yang dapat dikategorikan baik yang diukur dengan Rasio Efisiensi Belanja. Mengingat terbatasnya jumlah, jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang potensial untuk dikelola, dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan PAD.

Kata kunci: kinerja, keuangan, pemerintah.

ABSTRACT

Indicate financial performance and financial condition of the government's ability to obtain and use the funds for the development of the country and result in better public services . For that we need the government's performance is measured , the extent of progress made by the government in carrying out its duties . The purpose of this study to determine the financial performance of Manado City Government . This research was conducted at the office of the Mayor of Manado , the data used in the form of quantitative data Realized Budget Report (LRA) Year 2011-2013 . The method used descriptive quantitative method to measure the financial performance of the financial ratios . The degree of decentralization of research results ratio financial performance is insufficient , Regions Financial Dependency Ratio shows the dependence of Manado City Government on revenues of the Centre and the Province is still high , the degree of independence of Manado City Government is also still not measured by the ratio of Regional Financial Independence , then the effectiveness of revenue realization of Government revenue Manado city is said to be quite effective , as well as with the efficiency of Manado City Government expenditure which can be categorized either as measured by the ratio of expenditure efficiency . Given the limited number , type of sources of PAD, required submission of several national financial resources to potential managed , collected himself by becoming the reception area and PAD .

Keywords: performance, financial, government .

PENDAHULUAN

Latar Belakang

UU Nomor 22 Tahun 1999 berisi mengenai perlunya dilaksanakan otonomi daerah, sehingga UU tersebut sering disebut dengan UU Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Daya saing Pemda diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintah di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan yang akan, berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan, penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran.

Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan.

Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah serta secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya Nasional, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat secara demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, terutama kepada pemerintah propinsi, Kabupaten dan Pemerintah Kota. Kemampuan pemerintah Kota Manado dalam mengelola keuangan tercermin dalam rasio-rasio keuangan daerah. Analisis rasio terhadap APBD dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerahnya. Juga mengukur tingkat efisiensi belanja

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis optimalisasi kinerja keuangan di Pemerintahan Kota Manado dengan menggunakan indikator rasio keuangan pada APBD

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2009:62), anggaran publik berisi kinerja kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan penapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program kedalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkrit. Mahmudi (2011:59) anggaran sektor publik merupakan *blue print* organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan.

Kinerja Pemerintah Daerah

Mahsun (2006:25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Amins (2009:42), kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Nurlan (2009:128), APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Halim (2007:20), APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
4. Periode anggaran biasanya satu tahun

Rasio Keuangan sebagai Pengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Mahmudi (2010:142), analisis rasio keuangan terdiri dari:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi: } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah: } \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian: } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD: } \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

5. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja: } \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Peneliti Terdahulu

1. Sagay (2013) dengan judul Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2009-2011. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelola pendapatannya belum baik. Kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran belanja sudah cukup baik, ini dilihat dari tidak ada realisasi belanja yang melebihi anggaran.
2. Nadia (2014) dengan judul Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Manado Tahun anggaran 2010-2012 dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengukuran kinerja dari rasio derajat desentralisasi dinilai baik karena tiap tahun mengalami peningkatan, sedangkan tingkat kemandirian dan ketergantungan Pemerintah Kota Manado masih kurang. Kemudian PAD yang diterima dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dikatakan baik karena terjadi peningkatan tiap tahunnya.

METODE PENELITIAN**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, mengolah data dan informasi tersebut, menganalisis dan kemudian menarik kesimpulan.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. mengidentifikasi masalah yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
3. Mencari literatur-literatur yang terkait dalam penelitian ini
4. Mengumpulkan data-data yang terkait dalam penelitian di Pemerintah Kota Manado.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan Studi lapangan, metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini penelitian yang digunakan dengan tiga cara yaitu:

1. Wawancara langsung, yaitu dengan bertanya langsung kepada staf dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.
3. Pengamatan atau observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan kunjungan secara langsung kepada objek untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

Rasio keuangan yang digunakan dalam pembahasan bab IV ini adalah Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Belanja Kota Manado Tahun 2011-2013, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Adapun data yang digunakan adalah data yang berasal dari arsip dokumen pada bagian keuangan yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Pemerintahan Kota Manado. Dari hasil LRA APBD tersebut nantinya akan diketahui bagaimana Analisis Kinerja Keuangan Kota Manado.

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah.

$$\text{Derajat Desentralisasi} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1. Hasil perhitungan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Keuangan	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)	Tahun 2013 (%)
Rasio Derajat Desentralisasi	14,98	17,18	17,91

Sumber: Data Olahan, 2014

Terlihat bahwa rasio Pendapatan Asli daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Manado mengalami kenaikan. Pada Tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah Kota Manado sebesar Rp134.721.720.942 sedangkan Total Pendapatan Daerah Rp899.152.955.866, maka dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah yaitu sebesar 14,98%. Kemudian pada tahun 2012 PAD kota Manado mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp178.307.223.102 atau 17,18% dari TPD yang sebesar Rp1.037.498.574.726 dan pada tahun 2013 PAD Kota Manado Mengalami Kenaikan yang cukup signifikan yaitu Rp215.871.042.643 atau 17,91% dari TPD yang sebesar Rp1.204.927.489.606.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} : \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Hasil perhitungan menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Keuangan	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)	Tahun 2013 (%)
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	85,01	82,81	82,06

Sumber: Data Olahan, 2014

Tahun 2011 dana transfer yang diterima Pemerintah Kota Manado adalah sebesar Rp.764.431.234.924 atau 85,01% dari Total Pendapatan Daerah Kota Manado yang sebesar Rp.899.152.955.886. kemudian pada tahun 2012 dana transfer yang diterima yaitu sebesar Rp.859.191.351.624 sedangkan Total Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.037.498.574.726 atau Rasio ketergantungannya yaitu 82,81%. Tahun 2013 dana transfer yang diterima sebesar Rp.988.856.446.963 atau 82,06% dari Total Pendapatan Daerah yang sebesar Rp.1.204.927.489.606. Dengan Presentase rata-ratanya yaitu 83,29%

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah: } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+ Propinsi+ Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 3. Hasil perhitungan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Keuangan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
	(%)	(%)	(%)
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	17,62	20,75	21,83

Sumber: Data Olahan, 2014

Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Manado berkisar 17,62% sampai 21,83% atau terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi jauh lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Manado. Pada tahun 2011, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.134.721.720.942 sedangkan pendapatan transfer yang diterima mencapai Rp.764.431.234.924. Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Manado pada tahun 2011 yaitu 17,62%. Pada tahun 2012, PAD Kota Manado sebesar Rp.178.307.223.102 sedangkan pendapatan transfer yang diterima adalah Rp.859.191.351.624. Rasio Kemandirian Kota Manado yaitu 20,75%. Sedangkan pada tahun 2013, PAD Pemerintah Kota Manado adalah Rp.215.871.042.643 dan pendapatan transfer yang diterima adalah Rp.988.856.446.963 dan Rasio Kemandirian Pemerintah Kota manado tahun 2013 yaitu 21,83%.

4. Rasio Efektifitas PAD

Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD.

$$\text{Rasio Efektifitas PAD: } \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4. Hasil perhitungan menggunakan Rasio Efektifitas PAD

Rasio Keuangan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
	(%)	(%)	(%)
Rasio Efektifitas PAD	82,34	104,25	107,55

Sumber: Data Olahan, 2014

Realisasi penerimaan PAD Pemerintah Kota Manado meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan PAD 82,34%, kemudian tahun 2012 meningkat menjadi 104,33% dimana yang terealisasi melebihi yang ditargetkan, realisasi penerimaan pada tahun 2012 sebesar Rp.178.429.310.832 sedangkan yang menjadi target realisasi yaitu sebesar Rp.171.028.198.384. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan PAD Kota Manado kembali meningkat dengan yang terealisasi melebihi yang ditargetkan yaitu sebesar

Rp.215.871.042.643 atau 107,55% dari yang sudah ditargetkan Rp.200.716.511.942. Secara keseluruhan efektifitas penerimaan PAD Pemerintahan Kota Manado dapat dikategorikan cukup efektif karena tiap tahunnya terus meningkat.

5. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja dihitung dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja: } \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 5. Hasil perhitungan menggunakan Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Keuangan	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)	Tahun 2013 (%)
Rasio Efisiensi Belanja	94,09	91,11	84,50

Sumber: Data Olahan, 2014

Selama periode 2011-2013 tingkat efisiensi belanja Pemerintah Kota Manado dapat dikategorikan baik. Pada tahun 2011 realisasi belanja Pemerintah Kota Manado yaitu sebesar Rp.876.626.500.966 atau sebesar 94,09% dari yang dianggarkan yaitu Rp.931.667.619.397. kemudian pada tahun 2012 anggaran belanja yang dianggarkan untuk Pemerintahan Kota Manado mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.1.020.356.810.844 dan yang terealisasi sebesar Rp.929.713.979.980 atau 91,11%. Pada tahun 2013 anggaran belanja yang dianggarkan kembali naik yaitu Rp.1.286.788.237.248 dan terealisasi sebesar Rp.1.087.436.304.582 atau 89,90%.

Pembahasan

Meningkatnya kontribusi PAD menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pada tahun 2011-2013, melalui perhitungan menggunakan rasio derajat desentralisasi dapat dilihat bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah Pemerintah Kota Manado masih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Sagay (2013) pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, kontribusi PAD dalam penyelenggaraan desentralisasi di Kabupaten Minahasa Selatan masih lebih rendah bila dibandingkan yang ada pada Pemerintah Kota Manado. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah Kota Manado dalam penyelenggaraan desentralisasi cukup baik dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Besarnya rasio ketergantungan keuangan daerah berarti besar pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Meskipun ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Manado terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup tinggi, tapi setiap tahunnya rasio ketergantungan keuangan daerahnya terus mengalami penurunan meski tidak begitu signifikan. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya. Meski kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado belum mandiri tapi dapat dikatakan baik, karena setiap tahunnya angka rasio kemandiriannya terus meningkat. Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas PAD Pemerintah Kota Manado mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2012 dan 2013 penerimaan PAD lebih besar dari yang sudah ditargetkan. Dapat disimpulkan Pemerintah Kota Manado dalam merealisasi PAD sudah cukup efektif. Efisiensi belanja menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penghematan anggaran yang tidak melebihi anggaran yang dianggarkan. Tingkat efisiensi belanja Pemerintahan Kota Manado dapat dikategorikan baik karena tiap tahunnya realisasi anggaran belanja kota manado, semakin menurun dapat disimpulkan pemerintah kota manado tidak melakukan pemborosan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Tingkat kontribusi PAD terhadap TPD Kota Manado berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi, selama tiga tahun terakhir (2011-2013) masih kurang karena hanya memiliki rata-rata 16,69%, hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/ kemampuan keuangan Kota Manado masih rendah dalam melaksanakan otonominya.
2. Tingkat ketergantungan keuangan daerah Pemerintahan Kota Manado berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan ketergantungan Pemerintah Kota Manado terhadap pendapatan dari pusat atau provinsi masih tinggi dimana rata-rata selama tiga tahun terakhir (2011-2013) adalah 83,29%.
3. Tingkat Kemandirian Pemerintahan Kota Manado berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Manado dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Sosial masyarakat masih sangat rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat dimana rata-rata rasionya adalah 20,06%..
4. Tingkat Kefektifan realisasi anggaran Pemerintahan Kota Manado berdasarkan Rasio Efektifitas PAD, dapat dikategorikan cukup efektif dengan rata-rata rasionya adalah 98,07%, dimana efektifitas PAD Kota Manado terus meningkat dari tahun ke tahun.
5. Tingkat efisiensi belanja Pemerintahan Kota Manado berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja, dapat dikategorikan baik karena tiap tahunnya mengalami penurunan yang artinya pemerintah Kota Manado berhasil menghemat anggaran belanja tiap tahunnya dimana rata-rata selama tiga periode (2011-2013) adalah 89,90%.

Saran

Saran yang disampaikan penulis adalah:

1. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, sangat diperlukan kemandirian keuangan daerah agar tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh masing-masing daerah.
2. Mengingat terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan PAD.
3. Karena terbatasnya dana transfer yang diterima baik dari pemerintah pusat ataupun provinsi disarankan agar Pemerintah Kota Manado lebih teliti dan bijaksana dalam menggunakan anggaran yang dianggarkan. Juga agar Pemerintah Kota lebih menggunakan bahkan lebih menggali potensi-potensi di daerah agar ketergantungan dengan pihak ekstern dapat lebih diminimalisir dan lebih bergantung pada aset-aset yang dimiliki sendiri dan juga harus terus menjaga dan mengolah aset tersebut dengan baik dan benar

DAFTAR PUSTAKA

Amins, Achmad. 2009. *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Samarinda.

BPK-BMD.2014. *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2013*. Manado.

Halim Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.

Mahmudi, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Penerbit: UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Penerbit: UII Press, Yogyakarta.

Mahsun Muhammand, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama, BPFPE, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: CV ANDI Offset, Yogyakarta.

Nadya Pretti Kalalo.2014, Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal EMBA*. ISSN: 2303-1174. Vol. 2. No.1 Maret 2014. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/647>. Diakses: 2 November 2014. Hal. 595-719.

Nurlan Darise. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Indeks.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta*.

Sagay Brian. 2013. Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan. *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hal 45-78.

_____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. *tentang Pemerintah Daerah, Jakarta*.

_____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah, Jakarta*.

_____.UU No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, Jakarta*.

